

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gender merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam masalah pembangunan, terkhusus Sumber Daya Manusia di dunia. Meskipun isu ini tergolong ke dalam isu yang masih baru, gender telah menjadi sebuah pokok bahasan yang menarik untuk dikaji. Kebanyakan orang berpendapat bahwa gender identik dengan jenis kelamin, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Konsep gender merujuk pada atribut, peran sosial, serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki yang terbentuk berdasarkan konstruksi sosial dan dipelajari melalui proses sosialisasi.

Dalam *Webster's New World Dictionary*, edisi 1984 'gender' diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku'. Sementara itu dalam *Concise Oxford Dictionary of Current English* edisi 1990, kata 'gender' diartikan sebagai 'penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan)'. Peran dan hubungan gender ini bersifat dinamis karena sangat dipengaruhi oleh konteks, waktu, dan perubahan.

Isu gender yang muncul saat ini tidak dapat dilepaskan dari kesetaraan dan keadilan. Di era ini, muncul berbagai masalah mengenai kesetaraan gender dan ketidakadilan terhadap kaum gender tertentu. Permasalahan yang timbul biasanya

berupa tindakan diskriminasi yang diterima oleh kaum minoritas atau kelompok tertentu.

Salah satu kaum minoritas yang kerap menerima perlakuan diskriminatif adalah kaum LGBT atau *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*. LGBT merupakan sebuah istilah yang menggambarkan kaum dengan orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Istilah LGBT itu sendiri mulai tercatat sekitar tahun 1990-an. Jauh sebelum itu atau tepatnya sekitar tahun 60-an terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Seksual dimana didalamnya tidak ada istilah khusus untuk menyebutkan homoseksual.

Revolusi Seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik mengenai seksual (1960-1970). Revolusi Seksual ditandai dengan munculnya kebudayaan *freelove*, yaitu jutaan kaum muda yang menganut gaya hidup sebagai *hippie* (gaya hidup bebas yang muncul dan berkembang di Amerika Serikat). Mereka menyerukan kekuatan cinta dan keagungan seks sebagai bagian dari hidup yang alami. Kaum *hippie* percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan ditekan.

Setelah peristiwa tersebut, kaum homoseksual lebih dikenal dengan istilah LGB (Lesbian, Gay, Biseksual). Kata gay dan lesbian berkembang secara luas menggantikan istilah homoseksual karena dianggap lebih sederhana dan tidak membawa kata seks. Gay adalah istilah yang diberikan untuk menyebutkan seseorang yang menyukai sesama jenis dalam konteks laki-laki. Sebaliknya, lesbian merupakan istilah untuk penyuka sesama jenis dalam konteks perempuan. Istilah biseksual muncul setelah diketahui adanya individu yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama jenis maupun lawan jenis. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan psikologi muncul

istilah transgender. Transgender merupakan fenomena yang muncul belakangan dan tidak termasuk kedalam gay, lesbian dan biseksual. Transgender digunakan untuk menyebutkan orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seks atau jenis kelamin sejak lahir.

Saat ini perbedaan gender tersebut dikenal dengan istilah LGBT. Istilah tersebut telah menyebar secara luas dan muncul sebagai isu baru yang sangat menarik untuk dikaji. Isu tersebut cepat menyebar terutama terkait dengan tindakan diskriminasi yang diterima oleh kaum minoritas tersebut. Banyaknya tindakan diskriminasi yang diterima oleh kaum LGBT memunculkan perdebatan tersendiri. Perdebatan terjadi akibat adanya perbedaan sudut pandang terhadap isu ini, baik itu menurut Hak Asasi Manusia dan bahkan sampai menyangkut agama.

Akibat dari terus berkembangnya isu mengenai LGBT, banyak individu maupun kelompok yang hadir untuk melakukan dukungan dan melakukan perlawanan terhadap LGBT, namun ada juga kalangan yang mendukung keberadaan kaum LGBT. Sebagian kalangan melakukan perlawanan karena LGBT dianggap sebagai penyimpangan sosial. Namun sebaliknya, sebagian kalangan juga menunjukkan dukungan mereka dan berpendapat bahwa kaum LGBT juga perlu mendapatkan hak-hak yang sama, yaitu hak lahir sebagai manusia.

Salah satu organisasi yang peduli terhadap kaum LGBT adalah Institut Pelangi Perempuan (IPP). IPP merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang menjadi pusat kegiatan dan informasi bagi kelompok perempuan LBT (Lesbian, Bisexual perempuan, dan Transgender *female to male*) muda di Indonesia. IPP tidak semata-mata hanya berjuang untuk kaum perempuan yang memiliki orientasi seksual berbeda saja,

tetapi juga peduli akan semua kalangan yang memiliki permasalahan dalam hal orientasi seksual.

Salah satu bentuk perjuangan IPP bagi kaum minoritas dalam hal orientasi seksual seperti LGBT adalah dengan dibuatnya sebuah komik yang berjudul *Komik Yogyakarta Principles*. Komik tersebut terinspirasi dari sebuah dokumen yang dideklarasikan di Indonesia yaitu *Yogyakarta Principles* dan menceritakan sebuah kisah nyata seorang lesbian muda yang juga menjadi anggota dari IPP itu sendiri. *Yogyakarta Principles* merupakan sebuah tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan undang-undang HAM terkait dengan *Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)*.

Pada tahun 2006 silam di Indonesia atau tepatnya di Yogyakarta telah diadakan sebuah pertemuan para aktivis HAM yang peduli akan hak-hak kaum LGBT. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah dokumen bernama *Yogyakarta Principles* atau *Prinsip-Prinsip Yogyakarta*. Pada awalnya *Yogyakarta Principles* hanyalah sebuah seminar internasional yang dihadiri oleh 29 orang ahli HAM internasional. Seminar tersebut diselenggarakan pada tanggal 6-9 Nopember 2006 di Universitas Gadjah Mada.

Dipilihnya kota Yogyakarta sendiri dikarenakan oleh tiga alasan. *Pertama*, Yogyakarta merupakan kota pendidikan dimana diharapkan *Yogyakarta Principles* dapat diterima dengan mudah mengingat banyaknya kaum intelektual di kota tersebut. *Kedua*, Yogyakarta masih menggunakan sistem kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. *Ketiga*, Yogyakarta merupakan kota dimana tempat lahirnya organisasi gay dan lesbian pertama di Indonesia sekaligus di Asia bernama Lambda Indonesia.

Kerangka *Yogyakarta Principles* ini sebenarnya berawal sejak tahun 2005 yang dibuat oleh koalisi NGO yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia dan mendapat

fasilitas dari *International Service for Human Rights* dan *International Commission of Jurist*.<sup>1</sup> Prinsip-prinsip ini menegaskan standard legal yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua negara yang mana telah dibacakan dimuka sidang *Human Rights Council* PPB di Jenewa, Swiss pada tanggal 26 Maret 2007.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip ini mencakup eksekusi diluar hukum, kekerasan dan penyiksaan, akses pada keadilan, privasi atau pribadi, non-diskriminasi, hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, mendapatkan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, imigrasi dan isu pengungsian, partisipasi publik dan berbagai macam hak lainnya.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul sebuah permasalahan yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

*“Bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh Institut Pelangi Perempuan (IPP) dalam memperjuangkan hak-hak kaum LGBT melalui Yogyakarta Principles?”*

## **C. Kerangka Berpikir**

Untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh IPP dalam memperjuangkan hak-hak kaum LGBT mengenai orientasi

---

<sup>1</sup> Michael O’Flaherty dan John Fisher. *“Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles.”* Diakses dari <http://www.mut23.de/texte/Flaherty.pdf> pada 27 Desember 2016.

<sup>2</sup> Douglas Sanders. *“The Role of the Yogyakarta Principles”*, diakses dari <http://sxpolitics.org/wp-content/uploads/2009/03/yogyakarta-principles-2-douglas-sanders.pdf> pada 28 Desember 2016.

<sup>3</sup> Ardhanary Institute. *“Latar Belakang: Tentang Prinsip-Prinsip Yogyakarta”*, diakses dari <http://www.ypinaction.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta20Principles2020Bhs20Indonesia.pdf> pada 24 Desember 2016.

seksual dan identitas gender melalui *Yogyakarta Principles*, maka penulis akan menggunakan *Konsep Kelompok Kepentingan* dan *Transnational Advocacy Networking (TAN)*.

### **1. Konsep Kelompok Kepentingan**

Kelompok kepentingan sering dipahami sebagai sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai sebuah tujuan.<sup>4</sup> Mengenai batasan atau pengertian kelompok kepentingan, Eugene J. Klob dalam bukunya yang berjudul "*A Framework for Political Analysis*" menyebutkan bahwa:

*"A collectivity of individuals who either formally organize or informally cooperate to protect or promote some common, similar, identical, or shared interest or goal."*<sup>5</sup>

Sehubungan dengan perihal perbedaan tipe atau jenis kelompok kepentingan, Gabriel A. Almond membedakannya menjadi empat macam tipe atau jenis sebagai berikut.<sup>6</sup>

- Kelompok Anomik, merupakan jenis kelompok yang mengajukan kepentingan secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera.
- Kelompok Non-Assosional, merupakan tipe kelompok yang terbentuk apabila terdapat kepentingan yang sama untuk diperjuangkan (kegiatan bersifat temporer).

---

<sup>4</sup> Drs. Haryanto, "*Sistem Politik: Suatu Pengantar*," (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 72.

<sup>5</sup> Eugene J. Kolb, "*A Framework for Political Analysis*," (New Jersey: Prentice – Hall Inc, Englewood Cliffs, 1978), hal. 165.

<sup>6</sup> Miriam Budiarmo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*," (Jakarta: Kompas Gramedia) hal. 386.

- Kelompok Institusional, yaitu jenis kelompok kepentingan yang muncul di dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang fungsinya bukan mengartikulasikan kepentingan, seperti kelompok tertentu di dalam angkatan bersenjata, birokrasi, dan partai politik.
- Kelompok Assosional, yaitu tipe kelompok yang secara khusus berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok.

Masing-masing kelompok mempunyai strategi yang berbeda untuk memberikan sebuah pengaruh, karena itulah kelompok ini berusaha untuk mencari jaringan agar tuntutan mereka diperhatikan dan ditanggapi. Salah satu teknik penyampaian pengaruh yang dilakukan oleh kelompok kepentingan adalah *lobbying*.<sup>7</sup> Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan.

LGBT muncul akibat adanya persamaan tujuan yang ingin mereka capai. Akibat persamaan tersebut, kaum LGBT berkumpul dalam sebuah kelompok untuk melakukan *lobbying* agar apa yang menjadi tujuan mereka akan dapat lebih mudah terwujud. Kelompok LGBT tersebut tidak hanya berjuang dalam mengubah pandangan masyarakat saja, namun mereka juga berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sebuah negara.

Akibat sulitnya untuk melakukan *lobbying* terhadap pemerintah secara langsung, kaum LGBT membuat atau bergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi yang peduli terhadap kaum LGBT. Dengan begitu diharapkan akan lebih

---

<sup>7</sup> Bambang Cipto, “Politik dan Pemerintahan Amerika,” (Yogyakarta: Lingkaran, 2003), hal, 95.

mudah dalam mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah sebuah negara.

Hal tersebut juga dilakukan oleh Institut Pelangi Perempuan (IPP). IPP berusaha untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia dengan melakukan *lobbying* maupun advokasi. Namun sebelum hal tersebut dapat terwujud, IPP terlebih dahulu melakukan advokasi dikalangan masyarakat. IPP menggunakan media *Yogyakarta Principles* sebagai alat advokasi mereka. *Yogyakarta Principles* merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang pengaplikasian hukum HAM internasional mengenai orientasi seksual dan identitas gender.

## 2. *Transnational Advocacy Networking (TAN)*

*Transnational Advocacy Networks* merupakan sebuah jaringan aktifitas advokasi yang melibatkan aktifis dari dua atau lebih negara yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau aktifis di sebuah negara yang membentuk jaringan dengan aktifis di negara lain.<sup>8</sup> Jaringan ini dapat melibatkan berbagai aktor mulai dari kalangan NGO, intelektual, gerakan sosial, media massa, politisi, dan kadangkala sebagian pejabat baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri.<sup>9</sup>

Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink melihat jaringan sebagai suatu organisasi yang memiliki karakter komunikasi dan pertukaran yang sukarela, timbal balik, dan horisontal.<sup>10</sup> Jaringan ini memiliki tujuan untuk merubah perilaku negara serta organisasi internasional dan muncul karena tertutupnya akses antara

---

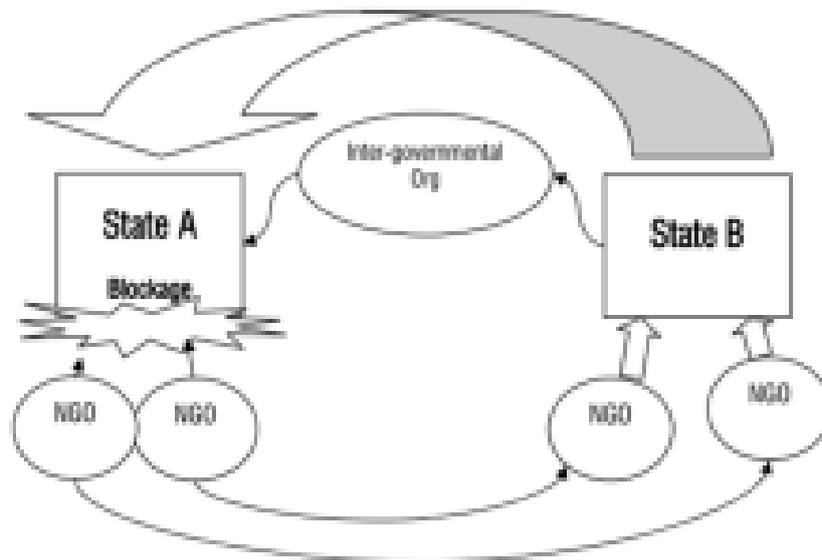
<sup>8</sup> Nur Azizah. " *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia* ", (Yogyakarta: LP3M UMY, 2013), hal. 24.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>10</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. "*Transnational Advocacy Network*", (Oxford: Blackwell Publishers, 1999).

masyarakat sipil dan pemerintah. Hal itulah yang disebut oleh Keck & Sikkink sebagai *Boomerang Pattern*.

**Gambar 1.1 Boomerang Pattern**



Sumber: Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. “*Transnational Advocacy Network*”, (Oxford: Blackwell Publishers, 1999), hal. 13.

Tertutupnya akses antara masyarakat dan pemerintah di negara A akhirnya membuat organisasi mencari jalan pintas dengan cara membuat sebuah jaringan atau bekerjasama dengan organisasi di negara B. Setelah adanya kerjasama, organisasi di negara B dapat memberikan desakan baik secara langsung atau melalui *Inter-governmental organization* seperti PBB. Organisasi di negara B, negara B, atau PBB dapat mendesak negara A untuk membuat sebuah kebijakan terkait isu yang menjadi pokok bahasan dalam jaringan tersebut.

Hal tersebut dilakukan karena para aktivis percaya bahwa jaringan dapat menjadi jalan bagi perjuangan mereka. Jaringan yang terjalin biasanya terjadi antara organisasi internasional atau NGO yang berada di negara berkembang dengan negara atau NGO di negara maju, dengan harapan negara atau NGO tersebut bisa

menekan negara yang dimaksud secara langsung ataupun bisa melalui organisasi internasional tersebut.<sup>11</sup>

Anheier dan Katz juga melihat bahwa analisis jaringan merupakan salah satu pendekatan yang dapat efektif menjelaskan pergerakan masyarakat sipil transnasional, karena pendekatan ini tidak dibatasi oleh lokasi geografis ataupun unit politik.<sup>12</sup> Keberhasilan sebuah jaringan dapat dilihat dalam beberapa tahap, yaitu dalam memetakan perdebatan dan menempatkan isu dalam agenda, dalam menggalang komitmen negara dan aktor-aktor lain, dalam membuat perubahan prosedural di tingkat internasional dan domestik, dalam mempengaruhi kebijakan, serta dalam mempengaruhi perubahan perilaku pada aktor-aktor target.<sup>13</sup> Ada beberapa taktik yang digunakan oleh jaringan, antara lain:<sup>14</sup>

- a. *Informan Politics*, merupakan kemampuan untuk memobilisasi informasi politik.
- b. *Symbolic Politics*, merupakan kemampuan untuk menyampaikan secara simbolik ataupun melalui tindakan dan narasi atas situasi yang sedang dialami kepada masyarakat lain yang berada dilintas batas.
- c. *Leverage Politics*, merupakan kemampuan untuk menarik perhatian aktor yang lebih kuat.
- d. *Accountability Politics*, merupakan upaya untuk mendorong aktor yang lebih kuat dalam bertindak sesuai kebijakan yang diambil.

Penulis akan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* atau TAN untuk menjelaskan cara-cara yang ditempuh oleh Institut Pelangi Perempuan (IPP) dalam memperjuangkan tujuannya. IPP menggunakan jejaring advokasi

---

<sup>11</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. “*Activist Beyond Border*”, (Ithaca: Cornell University Press, 1998).

<sup>12</sup> Helmut Anheier dan Hagai Katz. “*Global Civil Society 2001*”, (Oxford: University Press, 2001), hal. 206.

<sup>13</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. “*Transnational Advocacy Network*”, Op, Cit. Hal. 201.

<sup>14</sup> Ibid., hal. 95.

transnational untuk memperkenalkan isu yang menjadi pokok bahasan. IPP membangun sebuah jaringan dengan organisasi lain di negara yang sudah lebih dulu terbuka dalam menerima hak-hak kaum LGBT. Jaringan tersebut dibuat dengan harapan pemerintah negara yang masih buta akan hak-hak kaum LGBT dapat merubah cara pandanginya mengenai isu tersebut.

Institut Pelangi Perempuan (IPP) membangun jejaring transnasional dengan *Rainbow House* dan *Tels Quels* sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak kaum LGBT. IPP, *Rainbow House* dan *Tels Quels* menggunakan media yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Mereka menggunakan media berupa komik, yaitu *Komik Yogyakarta Principles*. *Komik Yogyakarta Principles* merupakan sebuah komik yang bercerita mengenai kisah nyata yang dialami oleh lesbian-lesbian muda di Jakarta yang kemudian dianalisa menggunakan *Yogyakarta Principles*. IPP mengharapkan adanya komik ini sebagai langkah awal untuk dapat melakukan desakan kepada pemerintah Indonesia.

Keinginan yang besar tersebut membuat IPP untuk membentuk jaringan dengan organisasi yang lebih besar lagi guna menambah besar efek yang akan dihasilkan. IPP kemudian membangun jejaring dengan cara bekerjasama dengan *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association* (ILGA). IPP memutuskan untuk bekerjasama dengan ILGA mengingat ILGA merupakan salah satu organisasi terbesar yang peduli akan kaum LGBT. kerjasama tersebut berupa pengenalan *Yogyakarta Principles* maupun *Komik Yogyakarta Principles* itu sendiri.

ILGA menyambut baik hal itu dan langsung menjadikan *Yogyakarta Principles* dan *Komik Yogyakarta Principles* sebagai salah satu bahasan mereka. ILGA juga menyebar luaskan kedua media tersebut ke berbagai negara melalui

jaringan yang mereka miliki. ILGA juga tidak hanya semata-mata menyebarkan dan memperkenalkan kedua media tersebut, tetapi juga berusaha untuk menjadikan *Yogyakarta Principles* dan *Komik Yogyakarta Principles* sebagai salah satu acuan terhadap isu LGBT.

Perjuangan ILGA akhirnya membuahkan hasil setelah *Yogyakarta Principles* dipresentasikan dalam sebuah pertemuan di Markas PBB di New York pada 7 Nopember 2007 dan membawa *Komik Yogyakarta Principles* pada pertemuan ke-55 *Commission on the Status of Woman (CSW)* Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada Januari 2012.

IPP dan ILGA berharap adanya desakan lebih gencar lagi dari pihak-pihak yang peduli terhadap LGBT terlebih di Indonesia sendiri telah berhasil menciptakan sebuah tatanan prinsip-prinsip hukum HAM internasional terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender yang bernama *Yogyakarta Principles* dimana dokumen tersebut telah dipublikasikan di seluruh dunia dan sudah pernah dibahas dimuka sidang PBB.

#### **D. Hipotesa**

Advokasi yang dilakukan oleh Institut Pelangi Perempuan (IPP) dalam memperjuangkan hak-hak kaum LGBT mengenai melalui *Yogyakarta Principles* adalah:

1. Institut Pelangi Perempuan (IPP) sebagai wadah perjuangan kaum LGBT dalam mewujudkan tujuan mereka.
2. Institut Pelangi Perempuan (IPP) membangun sebuah jejaring advokasi transnasional dengan *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association (ILGA)* untuk memperkenalkan dan mempromosikan *Yogyakarta*

*Principles* serta melakukan pembahasan *Yogyakarta Principles* ke dalam panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

### **E. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada proses advokasi yang dilakukan oleh Institut Pelangi Perempuan (IPP). Penulis akan membatasi jangkauan penelitian dengan berfokus pada media yang digunakan oleh IPP dalam beradvokasi, yaitu *Yogyakarta Principles*. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan batasan dalam penelitian sehingga pembahasan tidak meluas.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan memanfaatkan data-data yang berasal dari studi pustaka berupa buku teks, jurnal, terbitan berkala, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan berbagai sumber yang bersifat elektronik atau yang dapat diakses melalui jaringan internet seperti website atau laporan tahunan dan sumber lainnya.

### **G. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang muncul dengan dibuktikan menggunakan data-data maupun fakta serta untuk menjawab hipotesa dengan menggunakan kerangka berpikir yang relevan.

2. Memberikan penjelasan mengenai salah satu organisasi internasional yang pro terhadap kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)*. Dalam hal ini penulis mengangkat Institut Pelangi Perempuan (IPP).
3. Memberikan gambaran tentang kaum minoritas yang saat ini sedang berkembang secara pesat yaitu kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)*.
4. Memberikan penjelasan mengenai cara-cara yang digunakan oleh Institut Pelangi Perempuan (IPP) dalam mewujudkan tujuannya.
5. Memberikan gambaran mengenai *Yogyakarta Principles* yang digunakan oleh Institut Pelangi Perempuan (IPP) dalam memperjuangkan hak-hak kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*).

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I** dari penelitian ini berisikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang dari tema yang diangkat, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, batasan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II** dari penelitian ini berisikan penjelasan mengenai organisasi pro LGBT yaitu Institut Pelangi Perempuan (IPP), mulai dari profil organisasi, program terkait dengan LGBT, serta karya IPP dalam usaha untuk mewujudkan tujuan mereka.

**BAB III** dari penelitian ini berisikan pembahasan mengenai kaum minoritas LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*) meliputi sejarah dan perkembangan, hak-hak, serta media yang digunakan dalam memperoleh pengakuan.

**BAB IV** dari penelitian ini berisikan analisa mengenai proses advokasi yang dilakukan oleh Institut Pelangi Perempuan (IPP) dalam memperjuangkan hak-hak kaum LGBT melalui media *Yogyakarta Principles*.

**BAB V** penelitian ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

